

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan pokok, kebutuhan mental, spiritual dan kebutuhan sosialnya sehingga seorang individu, kelompok atau masyarakat tersebut dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya. Menurut Arthur Dunham dalam (Pujileksono, 2016) menjelaskan bahwa:

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kebutuhan keluarga dan anak, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009).

Kedua penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi dimana dapat terpenuhinya segala kebutuhan material, spiritual dan kebutuhan sosial seorang individu, kelompok atau komunitas melalui

kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan cara memberikan bantuan-bantuan berupa pelayanan sosial sehingga terpenuhi segala kebutuhan dari individu, kelompok atau komunitas tersebut. Kondisi sejahtera dapat terjadi apabila kehidupan manusia dirasa aman, bahagia, tentram dan terlindungi dari segala ancaman serta dengan segala kebutuhan yang dapat terpenuhi juga terjamin dengan baik.

Arti kesejahteraan sosial sebagai pelayanan sosial biasanya digunakan oleh negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru untuk menggambarkan pelayanan sosial yang berkaitan dengan jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social service*). Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan dengan sejarah perkembangan usaha kesejahteraan sosial di Inggris sekitar awal abad ke-17 dengan dibuatnya *The Elizabethan Poor Law of 1601* (undang-undang kemiskinan). Pelayanan sosial sendiri bertujuan untuk membantu individu, kelompok atau komunitas agar dapat meningkatkan kapasitas dan peran-peran sosialnya (Pujileksono, 2016).

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Adanya kesejahteraan sosial tentu memiliki tujuan. Tujuan dari kesejahteraan sosial menurut Fahrudin, dalam buku Pengantar Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

2. Untuk mencapai peyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Sedangkan menurut Schneiderman (1972) menjelaskan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yaitu:

- a) *Pemeliharaan Sistem*

Yaitu kesejahteraan sosial yang mencakup pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial. Hal ini berhubungan dengan definisi makna dan tujuan hidup; Motivasi dalam mempertahankan kelangsungan hidup dari individu dan kelompok; Norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peran-peran berdasarkan usia dan jenis kelamin; Norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa atau pelayanan; Norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lain-lain.

- b) *Pengawasan Sistem*

Tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada. Tujuan ini dapat dicapai dengan melalui kegiatan-kegiatan meliputi; (1) Mengidentifikasi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, resosialisasi, peningkatan kemampuan bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri sendiri (*self-control*) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya. (2)

Menggunakan prosedur-prosedur dan batasan-batasan hukum untuk meningkatkan pengawasan eksternal (*external-control*) terhadap penyimpangan tingkah laku misalnya orang tua yang menelantarkan anaknya, kejahatan, kenakalan remaja, dan sebagainya.

c) *Perubahan Sistem*

Tujuannya untuk mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan suatu alat untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap terwujudnya: (1) Partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; (2) Pembagian sumber-sumber secara lebih adil dan merata; (3) Penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara lebih banyak dan juga adil.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Pada dasarnya fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan karena terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif terhadap pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat empat fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin, dalam buku Pengantar Kesejahteraan Sosial yaitu:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.4 Komponen Kesejahteraan Sosial

Sebagai suatu kondisi, kesejahteraan sosial memiliki komponen-komponen yang menunjang dari kegiatan usaha pada bidang kesejahteraan sosial, yang hal tersebut menjadi salah satu pembeda antara kegiatan usaha bidang kesejahteraan sosial dengan bidang kegiatan lainnya. Mengutip dalam buku Pengantar

Kesejahteraan Sosial (Fahrudin, 2018a). Yang menjadi komponen-komponen kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi Formal

Usaha Kesejahteraan Sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

2. Pendanaan

Tanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. mobilitas dana dan sumber (*fund raising*) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan, kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata.

3. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis dan menggunakan metoda serta teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5. Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.

6. Peranserta Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peranserta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

7. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa adanya data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Komponen-komponen kesejahteraan sosial yang telah disebutkan diatas merupakan penunjang dalam suatu kegiatan usaha pada bidang kesejahteraan sosial dan komponen-komponen tersebut menjadi ciri-ciri yang membedakan antara kegiatan usaha kesejahteraan sosial dengan usaha kegiatan dalam bidang lainnya.

2.1.5 Bidang-bidang Kesejahteraan sosial

Di Indonesia, bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit sering di identikkan dengan bidang-bidang yang ditangani oleh kementerian sosial, atau di negara berkembang lainnya biasa dikaitkan dengan *Ministry of Health and Welfare* (Kementerian Kesejahteraan dan Kesehatan. Dalam (Rukminto Adi, 2018) disebutkan ada beberapa bidang-bidang kesejahteraan sosial. Bidang-bidang kesejahteraan sosial yang telah disebutkan diantaranya yaitu:

- 1) Bidang yang terkait dengan sistem penyampaian pelayanan (*service delivery system*);
- 2) Bidang yang terkait dengan layanan sosial terhadap keluarga;
- 3) Bidang yang terkait dengan pelayanan terhadap anak-anak dan generasi muda.
- 4) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia (lansia);
- 5) Bidang yang terkait dengan kelompok khusus (pengguna atau penyalahguna narkoba, kelompok perempuan yang secara sosial kurang diuntungkan, orang dengan *HIV/AIDS*, dan penyandang disabilitas);
- 6) Bidang yang terkait dengan jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial)
- 7) Bidang yang terkait dengan pengentasan kemiskinan;
- 8) Bidang yang terkait dengan kesehatan masyarakat;
- 9) Bidang yang terkait dengan perawatan medik;
- 10) Bidang yang terkait dengan layanan kesehatan jiwa;
- 11) Bidang yang terkait dengan lembaga koreksional;
- 12) Bidang yang terkait dengan lembaga pendidikan; dan
- 13) Bidang yang terkait dengan sektor lain (industri).

Dari bidang-bidang yang telah disebutkan diatas, hampir semua bidang-bidang tersebut juga ada di Indonesia. Secara umum kesejahteraan sosial bisa dikatakan menyeluruh pada setiap bidang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau pelayanan kemanusiaan.

2.2 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

2.2.1 Definisi Pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka sehingga berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat

yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow,1999). Sebagai suatu aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh tiga komponen dasar, komponen-komponen tersebut yaitu; (1) Kerangka pengetahuan (*body of knowledge*); (2) Kerangka keahlian (*body of skill*); (3) Kerangka nilai (*body of values*) (Effendi, 2020). Ketiga komponen tersebut dibentuk dan dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu antropologi, ilmu filsafat, ilmu politik dan ilmu ekonomi.

Menurut Goldstein (1973), pekerjaan sosial adalah suatu bentuk intervensi sosial untuk membantu seseorang baik secara individual maupun kolektif dalam mengatasi “permasalahan sosial” dalam eksistensi sosialnya. Sedangkan menurut Max Siporin (1975), bahwa pekerjaan sosial adalah praktik profesional yang dalam tindakan dan pelayanannya dilakukan oleh orang yang mendapatkan pendidikan khusus dan secara formal memiliki izin serta kewenangan untuk melaksanakan tugasnya (Pujileksono et al., 2018).

NASW (2013) menyebutkan bahwa pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut: membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan-pelayanan

sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; tentang institusi-institusi sosial, ekonomi, dan kultural; dan tentang interaksi antara semua faktor ini (Fahrudin, 2018)

Praktik pekerjaan sosial berbasis kekuatan, artinya pekerja sosial membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi masalah mereka, menentukan keterampilan dan kapasitas mereka, apa yang mereka lakukan dengan baik, bagaimana hal itu dilakukan, dan kemudian menganalisis cara-cara kekuatan tersebut dapat diterapkan pada masalah yang telah teridentifikasi. Sehingga berdasarkan dari definisi pekerjaan sosial diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah salah satu kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok, komunitas dan masyarakat dalam hal pelayanan sosial dan bantuan intervensi baik secara ekonomi, fisik, mental, dan sosial. Pekerjaan sosial juga dapat membantu individu, kelompok, atau komunitas dan masyarakat tersebut untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuannya sehingga dapat menjalankan kembali keberfungsian sosialnya.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki tujuan umum yaitu untuk melakukan perubahan yang terkendali dan berencana dalam sistem kepribadian individu dan sistem sosial. Mengutip dalam buku Dasar-Dasar Praktik Pekerjaan Sosial (Pujileksono et al., 2018) tujuan-tujuan pekerjaan sosial juga meliputi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah.

- 2) Menghubungkan orang dan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan.
- 3) Meningkatkan efektivitas operasional sistem secara manusiawi.
- 4) Memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan perumusan serta implementasi kebijakan sosial.

Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*Social Functioning*) dengan melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna. Keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial dan merupakan salah satu pembeda antara pekerjaan sosial dengan profesi lainnya (Suharto, 2009)

Karakteristik pembeda lainnya antara bidang pekerjaan sosial dengan profesi bidang lainnya adalah penekanannya pada model *person in environment* dan penekanannya pada keadilan sosial. Dengan kata lain, seorang pekerja sosial tidak hanya mempertimbangkan perjuangan internal individu, mereka juga bekerja sama dengan orang untuk memeriksa hubungan, sejarah keluarga, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan struktur serta kebijakan yang berdampak kepada mereka untuk mengidentifikasi cara-cara dalam membantu mengatasi masalah atau tantangan.

2.2.3 Pekerja Sosial Sebagai Profesi

Sebagai suatu profesi, pekerja sosial memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar dan mengembangkan teori-teori yang ada serta mempunyai kode etik dalam pelaksanaan praktiknya. Upaya yang dilakukan pekerja sosial adalah

mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fungsi ini dilaksanakan dengan melalui berbagai usaha pekerjaan sosial dalam bentuk intervensi sosial seperti dengan melalui pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan, dan memelihara penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial. (Andari, 2020)

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial pada Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa “Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.” (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, 2019)

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan pada Pasal 1 Ayat 4 bahwa “Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009)

Profesional dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Definisi

profesional dalam hal ini mengacu pada orang yang hidup dengan cara mempraktikkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan berdasarkan keahliannya. Maka pekerja sosial profesional adalah seseorang yang menjalankan profesi sebagai pekerja sosial dengan mempraktikkan keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial yang diperoleh dengan melalui jenjang pendidikan tinggi, pelatihan dan pengalaman praktik. Sebagai seorang profesional terdapat tiga komponen pokok yang harus dimiliki. Komponen tersebut yaitu keterampilan (*Skill*), pengetahuan (*Knowledge*) dan sikap (*Attitude*). (Pujileksono et al., 2018)

Kemudian menurut Greenwood dalam (Fahrudin, 2018b) disebutkan ada beberapa kriteria profesi. Kriteria-kriteria tersebut yaitu:

1. Suatu profesi memunyai pengetahuan dasar dan mengembangkan sekumpulan teori yang sistematis yang mengarahkan ketrampilan-keterampilan praktik; persiapan pendidikan haruslah bersifat intelektual maupun praktikal.
2. Kewenangan dan kredibilitas dalam hubungan klien-tenaga profesional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi profesional.
3. Suatu profesi diberi kekuatan untuk mengatur dan mengontrol keanggotaan, praktik profesional, pendidikan, dan standar kinerjanya sendiri. Masyarakat membenarkan kekuatan-kekuatan pengaturan dan hak-hak istimewa profesional.

4. Suatu profesi mempunyai kode etik pengaturan yang mengikat, yang dapat ditegakkan, eksplisit, dan sistematis yang memaksa perilaku etik oleh anggota-anggotanya.
5. Suatu profesi dibimbing oleh budaya nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol dalam suatu jaringan organisasi dari kelompok-kelompok formal dan informal, sebagai saluran untuk profesi itu berfungsi dan melaksanakan pelayanan-pelayanannya.

Seorang pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu profesi mempunyai unsur-unsur seperti pengetahuan, sikap dan keterampilan. Unsur tersebut menjadi hal penting dalam aktivitasnya sebagai pekerja sosial pada pelaksanaan praktiknya di lingkungan sosial. Pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi yang mempunyai tujuan dalam memberikan pertolongan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sekaligus membantu mereka agar dapat menjalankan peran sosialnya serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya sehingga dapat menciptakan perubahan sosial di kehidupannya. Sebagai seorang pekerja sosial juga dalam menjalankan praktiknya hendaknya harus mempunyai kemampuan, nilai-nilai, etika dan prinsip. Hal tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan praktik pekerja sosial tersebut.

2.2.4 Definisi Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial sangat berkaitan erat dengan pekerjaan sosial. Seorang pekerja sosial dituntut untuk membantu individu, keluarga, kelompok atau masyarakat agar terhindar dari disfungsi sosial atau dengan kata lain mampu untuk

membantu mengembalikan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang menjadi kliennya.

Menurut Raharjo (2017) bahwa secara sederhana keberfungsian sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau juga kapasitas seseorang tersebut dalam menjalankan tugas-tugas pada kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. (Apriliani et al., 2020)

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial disebutkan pada Pasal 1 Ayat 3 bahwa “Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.” (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, 2019) Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga, dapat diartikan bahwa masing-masing individu dan kelompok memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dirinya, pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga yang menjadi tanggungan dan pemberian kontribusi yang positif terhadap masyarakat.

Keberfungsian sosial merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi dan peran sosialnya dengan memiliki kapasitas dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya sesuai dengan status sosialnya. Dalam hal ini pekerjaan sosial berhubungan dengan keberfungsian sosial pada setiap individu,

keluarga, kelompok maupun masyarakat akan tetapi yang menjadi prioritasnya yaitu dalam masalah pemenuhan kebutuhan dasarnya. Keberfungsian sosial tidak terlepas dari karakteristik seseorang dengan lingkungan sosialnya.

Keberfungsian sosial pada dasarnya merupakan suatu hal dalam setiap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan dasarnya, melaksanakan peran dan fungsi sosialnya sesuai dengan status sosialnya. Apabila individu atau kelompok tidak mampu menjalankan peranan sosialnya, maka hal tersebut dikatakan sebagai disfungsi sosial. Dimana disfungsi sosial ini merupakan keadaan ketika seseorang tidak mampu untuk menjalankan tanggung jawab pada dirinya sendiri sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat terpenuhi dengan baik dan tidak mampu menjalankan peranannya sesuai dengan status sosialnya.

Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan dari apakah keberfungsian sosial tersebut mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, mampu memberikan kesejahteraan pada kehidupannya dan apakah keberfungsian sosial yang didapatkannya dibenarkan secara sosial. Keberfungsian sosial juga menunjukkan keseimbangan dan penyesuaian timbal balik antar individu dan lingkungan sekitarnya. Keberfungsian sosial tersebut dapat dicapai dengan cara adanya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar baik dalam segi kebutuhan materil, spiritual dan sosialnya.

2.2.5 Definisi Pekerja Sosial

Pekerja sosial merupakan salah satu kegiatan profesional dengan tujuan yaitu untuk memperbaiki kemampuan individu, kelompok maupun komunitas agar kembali berfungsi sosial juga untuk menciptakan suatu kondisi di masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhannya juga terlepas dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.” Sejalan dengan undang-undang tersebut, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 ayat 4 bahwa yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Seorang pekerja sosial berkaitan erat setiap praktik pertolongannya dengan kesejahteraan sosial. Di setiap bidang kesejahteraan sosial seperti yang telah disebutkan sebelumnya pasti ada seorang pekerja sosial didalamnya untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sosial. Dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial selayaknya memiliki standar kompetensi pekerja sosial yang meliputi standar pengetahuan, keterampilan dan nilai dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial.

2.2.6 Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang profesional, maka pekerja sosial memiliki peran dalam setiap kegiatan yang dilakukannya terhadap klien. menurut Zastrow (1996) dalam (Effendi, 2020) bahwa peran-peran pekerja sosial diantaranya yaitu:

- a. *Enabler*, pekerja sosial berperan sebagai pemungkin perubahan pada klien dengan mengacu pada kebutuhan dan kemampuan klien;
- b. *Broker*, pekerja sosial berperan dalam menghubungkan klien dengan berbagai sitem sumber yang potensial;
- c. *Advocate*, pekerja sosial berperan sebagai advokat yang umumnya fokus pada beragam kebijakan yang merugikan bagi klien;
- d. *Activist*, pekerja sosial dapat berperan untuk berusaha dalam menciptakan lingkungan yang mampu menunjang pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat;
- e. *Mediator*, pekerja sosial berperan sebagai penengah diantara kelompok yang tengah berkonflik;
- f. *Negotiator*, pekerja sosial dapat berperan menjadi penghubung pikiran diantara pihak yang tengah berkonflik untuk merumuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak;
- g. *Educator*, pekerja sosial dapat berperan menjadi pengajar bagi klien untuk mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial klien;
- h. *Initiator*, pekerja sosial dapat berperan sebagai inisiator keputusan dengan tetap meyakini bahwa keputusan akhir merupakan hak pribadi klien;

- i. *Empowerer*, pekerja sosial dapat bekerja dengan berfokus pada pemberdayaan klien dengan merujuk pada kondisi lingkungan serta kekuatan/potensi yang dimiliki oleh klien;
- j. *Coordinator*, pekerja sosial dapat berperan dalam membantu klien dengan memilih sistem sumber sesuai dengan skala prioritas kebutuhan klien;
- k. *Researcher*, pekerja sosial dapat berperan sebagai peneliti yang fokus pada beragam isu-isu kesejahteraan sosial;
- l. *Group Facilitator*, pekerja sosial dapat berperan sebagai pemimpin dalam grup yang umumnya peran ini ditemui pada saat pekerja sosial bekerja dengan kelompok; dan
- m. *Public Speaker*, pekerja sosial juga dapat berperan sebagai komunikator yang mewakili klien ketika berhadapan dengan institusi tertentu.

Tentunya dari semua peran-peran yang telah disebutkan diatas, seorang pekerja sosial tidak dapat melaksanakan semua peran tersebut secara bersamaan. Namun dalam setiap masalah yang dialami klien seorang pekerja sosial dapat membantu klien tersebut berdasarkan peran apa yang sesuai untuk membantu penyelesaian masalah klien tersebut.

2.3 Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial

2.3.1 Definisi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial (*social service*) memiliki arti yang cukup luas, karena kata *service* mempunyai berbagai arti seperti pekerjaan atau kewajiban yang dilakukan untuk pemerintah, perusahaan, atau militer. Kata *service* juga dapat diartikan sebagai perawatan dan perbaikan mengenai hal otomotif atau mesin dan masih

banyak arti lainnya. Namun menurut Spicker (1995) dalam (Fahrudin, 2018a) menjelaskan bahwa pelayanan sosial yaitu meliputi jaminan sosial, perumahan, kesehatan, pekerjaan sosial dan pendidikan (sebagai lima besar). Definisi tersebut merupakan definisi pelayanan sosial secara luas.

Menurut Sainsbury (1986) dalam (Fahrudin, 2018a) bahwa pelayanan-pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal services*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atas tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya. Menurut Sainsbury pelayanan-pelayanan sosial secara luas ini meliputi kesehatan, pendidikan, pemeliharaan penghasilan, perumahan dan pelayanan sosial personal.

Pelayanan sosial terkadang dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial, pelayanan pendidikan bagi yang kurang mampu atau bantuan-bantuan yang ditujukan pada individu-individu atau keluarga-keluarga yang mengalami masalah penyesuaian diri dan keberfungsian atau kemiskinan untuk dipecahkan masalahnya.

2.3.2 Pelayanan Sosial Personal

Pelayanan sosial personal atau pelayanan sosial umum adalah suatu program yang melindungi atau membantu mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu-individu dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul atau disebabkan

dari diri sendiri maupun masalah-masalah dari luar, meningkatkan perkembangan dan memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, advokasi dan beberapa jenis bantuan yang konkret. Pelayanan sosial personal berkepentingan dengan kebutuhan-kebutuhan yang secara tradisional diatasi dengan tindakan pribadi atau keluarga.

Pelayanan sosial personal berkaitan dengan keadilan yang memperlakukan orang yang berbeda secara berbeda pula, bukan keadilan yang memperlakukan orang yang berbeda secara sama. Sumber-sumber disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu atau kelompok dan bukan dengan persamaan-persamaan diantara orang-orang. Pelayanan sosial personal mengupayakan keseimbangan antara memperhatikan kebutuhan yang sama dari suatu kelompok tertentu dengan menekankan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak individual seorang anggota tertentu dari kelompok tertentu. (Fahrudin, 2018a)

Pelayanan sosial personal merupakan bidang utama untuk praktik pekerjaan sosial. Tetapi tidak semua pelayanan sosial personal dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Misalnya, pelayanan bantuan kegiatan rumah tangga (*home help service*) sangat mengindividualisasi, tetapi tidak dilaksanakan oleh seorang pekerja sosial. Pelayanan sosial personal tersebut menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing penerima pelayanan dan dalam pelayanan sosial personal tersebut mengusahakan keseimbangan dalam memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dari penerima pelayanan dengan menekankan pada kebutuhan dan hak-hak individual dari masing-masing penerima pelayanan tersebut. Pada pemberian pelayanan sosial personal ini dimaksudkan untuk

membantu dalam memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya dalam cara yang di individualisasikan sehingga mereka dapat melakukan perubahan dalam dirinya sendiri.

2.3.3 Pelayanan sosial Manusia

Sauber (1983) dalam (Fahrudin, 2018a) menjelaskan bahwa pelayanan sosial manusia (*human service*) dikatakan sebagai suatu istilah yang membingungkan karena dapat ditafsirkan dalam banyak arti. Namun untuk kejelasannya dan kegunaan operasional serta kesesuaian ideologis, pelayanan sosial manusia dapat didefinisikan sebagai meliputi sistem pemberian pelayanan untuk kesehatan mental, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan peradilan kriminal.

Menurut Kahn (1979) menyebutkan bahwa *human service* merupakan istilah baru sebagai kata penghalus (*euphemism*). Istilah baru ini sebenarnya membawa pengertian pelayanan sosial dalam arti yang luas, yang mencakup pelayanan-pelayanan universal, yaitu pelayanan untuk semua warga negara, dan pelayanan-pelayanan untuk kelompok-kelompok yang mempunyai kebutuhan khusus. Pelayanan sosial manusia ini mendapatkan pengetahuannya dan keterampilannya dari psikologi, pekerjaan sosial dan konseling. Dalam hal tersebut pelayanan-pelayanan yang diberikan bukan semata-mata hanya pelayanan saja tetapi pelayanan yang sudah terorganisir dan terencana dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut pelayanan sosial manusia adalah suatu aktivitas dalam pemberian pelayanan kepada individu dan masyarakat dengan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai salah satu bentuk upaya dalam membantu mereka

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya sehingga keberfungsian sosialnya bisa berjalan dengan baik.

2.3.4 Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial sebagai bentuk strategi dalam membantu individu maupun kelompok yang mengalami suatu hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dalam hal tersebut pelayanan sosial tentunya memiliki fungsi dalam membantu memperbaiki hubungan individu atau kelompok dengan lingkungan sosialnya. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat;
- 2) Pengembangan sumber-sumber manusiawi;
- 3) Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial;
- 4) Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan; dan
- 5) Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

Sedangkan menurut Kahn (1979) dalam (Fahrudin, 2018a) mengemukakan fungsi pelayanan sosial personal dikelompokkan menjadi tiga golongan. Fungsi-fungsi yang disebutkan tersebut yaitu:

- 1) Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan.

- 2) Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan dan rehabilitasi termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
- 3) Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi dan arahan.

Pelayanan sosial bukan hanya sekedar memberikan suatu informasi dan program pelayanan yang ada dengan semata-mata, tetapi pelayanan sosial ini menciptakan suatu strategi dalam meningkatkan taraf kehidupan setiap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dengan melaksanakan program-program pada pelayanan yang sudah terorganisir dengan matang sesuai dengan fungsi-fungsi pelayanan sosial tersebut dengan tujuan untuk membantu setiap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam membantu mengatasi hambatan-hambatan sosialnya yang mereka hadapi.

2.4 Tinjauan Tentang Resiliensi

2.4.1 Definisi Resiliensi

Resiliensi merupakan teori yang telah dikembangkan dalam konteks psikopatologi perkembangan dan diwarnai oleh perspektif ekosistem, teori stres serta coping. Resiliensi dapat dikatakan sebagai kapasitas seseorang untuk mempertahankan kemampuan untuk berfungsi secara kompeten dalam menghadapi berbagai stresor kehidupan. Menurut Grotberg (1999) dalam (Hendriani, 2022) menjelaskan bahwa “resiliensi merupakan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi, serta kapasitas manusia untuk menghadapi dan memecahkan masalah setelah mengalami kesengsaraan (masalah).” Sedangkan menurut Reivich and Shatte (2002) resiliensi adalah “kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit.”

Definisi lainnya dikemukakan oleh Richardson (2002) bahwa resiliensi adalah proses koping terhadap stresor, kesulitan, perubahan maupun tantangan yang dipengaruhi oleh faktor protektif. Resiliensi psikologis ini akan mencerminkan bagaimana kekuatan dan ketangguhan yang ada dalam diri seseorang. Resiliensi psikologis ditandai oleh kemampuan untuk bangkit dari pengalaman emosional yang negatif. Seorang yang resilien akan berusaha untuk menghadapi dan kemudian bangkit dari berbagai kondisi stres dengan kemampuan yang dimilikinya.

Resiliensi memiliki keterkaitan yang erat dengan pandangan psikologi positif yang berakar pada mazhab atau aliran psikologi humanistik. Seligman dan Csikszentmihalyi (2000) mendefinisikan psikologi positif sebagai studi ilmiah tentang fungsi manusia yang positif dan berkembang pada beberapa tingkat yang mencakup biologi, personal, relasional, kelembagaan, budaya dan dimensi global kehidupan. (Hendriani, 2022) Resiliensi bukan merupakan sebuah sifat yang menetap pada diri individu, namun merupakan hasil transaksi yang dinamis antara kekuatan dari luar dengan kekuatan dari dalam individu. Resiliensi dalam pengertian ini tidak dilihat sebagai atribut yang pasti atau semata-mata sebuah luaran, namun sebagai sebuah proses dinamis yang berkembang sepanjang waktu. Resiliensi juga dipandang sebagai fenomena yang bersifat "*fluid*" antarwaktu. Individu mungkin resilien pada suatu tahap perkembangan, namun tidak pada tahap perkembangan yang lain. Terkait dengan hal tersebut maka faktor risiko dan protektif yang berperan penting di dalamnya pun bervariasi antar tahap perkembangan manusia.

Dengan demikian, resiliensi dapat disimpulkan sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan peran berbagai faktor individual maupun sosial atau lingkungan, yang mencerminkan kekuatan dan ketangguhan seseorang untuk bangkit dari pengalaman emosional negatif saat menghadapi situasi sulit yang menekan atau mengandung hambatan-hambatan yang signifikan.

2.4.2 Komponen Resiliensi

Menurut Grotberg (1999) dalam (Hendriani, 2022) menyebutkan bahwa komponen resiliensi dengan istilah sumber. Menurutnya, terdapat tiga sumber resiliensi individu (*three sources of resilience*) yaitu : *I have*, *I am*, dan *I can*. Ketiganya saling berinteraksi dan menentukan bagaimana resiliensi individu kemudian.

1) *I Have*

Adalah sumber resiliensi yang berhubungan dengan besarnya dukungan sosial yang diperoleh dari sekitar, sebagaimana dipersepsikan atau dimaknai oleh individu. Mereka yang memiliki kepercayaan rendah terhadap lingkungannya cenderung memiliki sedikit jaringan sosial dan beranggapan bahwa lingkungan sosial hanya sedikit memberikan dukungan kepadanya.

2) *I Am*

Adalah sumber resiliensi yang berkaitan dengan kekuatan pribadi dalam diri individu. Sumber ini mencakup perasaan, sikap dan keyakinan pribadi.

3) *I Can*

Adalah sumber resiliensi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memecahkan masalah menuju keberhasilan dengan

kekuatan diri sendiri. *I can* berisi penilaian atas kemampuan diri yang mencakup kemampuan menyelesaikan persoalan, keterampilan sosial dan interpersonal.

Lebih lanjut Grotberg (1999) menjelaskan bahwa ketiga komponen *I have* (*external support*, *I am* (*inner strengths*), dan *I can* (*interpersonal and problem solving skills*) akan memengaruhi perilaku individu menjadi relatif stabil, dengan respon-respon yang bermakna terhadap berbagai macam situasi dan kondisi yang dihadapi. Menurutnya, anak dan remaja dapat belajar untuk mampu merespon berbagai tekanan dan kesulitan secara resilien.

2.4.3 Aspek-Aspek Resiliensi

Resiliensi berguna dalam kehidupan sosial seseorang, ketika seseorang disebut resilien maka orang tersebut dapat terlepas dari tekanan dan mampu bangkit atas segala permasalahan yang ia hadapi. Tentunya untuk menjadi resilien, seseorang dapat dilihat dari aspek-aspek resiliensi yang ada. Menurut Reivich dan Shatte (2002) mengutip dalam (Fajariyah, 2021) disebutkan bahwa aspek-aspek resiliensi terdiri dari regulasi emosi, pengendalian diri, optimisme, analisis penyebab masalah, empati, efikasi diri dan kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan.

2.4.3.1 Regulasi Emosi (*Emotion Regulation*)

Regulasi emosi merupakan upaya atau usaha seseorang dalam menghadapi situasi dengan tetap bersikap tenang meskipun berada dibawah tekanan. Emosi ini tidak saja hanya dapat berupa ekspresi yang negatif, namun dapat pula berupa emosi positif jika dilakukan dengan baik dan tepat.

2.4.3.2 Pengendalian Diri (*Impuls Control*)

Pengendalian diri merupakan kapasitas seseorang dalam mengontrol keinginan atau hasrat yang timbul dari dalam dirinya. Perubahan emosi secara drastis biasanya sering terjadi akibat dari rendahnya kemampuan seseorang menata atau mengatur emosinya. Rendahnya *impuls* kontrol dapat memicu hilangnya kendali emosi yang berakibat pada timbulnya perilaku tempramen, tidak bisa sabar, agresif dan lain sebagainya. Hal ini berpengaruh terhadap hubungan sosial dan persepsi negatif terhadap orang-orang di sekitar.

2.4.3.3 Optimis (*Optimist*)

Optimis merupakan salah satu sikap positif yang dipandang dari segala hal juga termasuk tentang kondisi masa depan seseorang. Individu yang optimis biasanya cenderung memiliki kesehatan mental, fisik dan psikologis yang stabil jika dibandingkan dengan individu yang mudah untuk merasa putus asa (pesimis). Sikap optimis juga sangat berpengaruh dan berperan penting dalam membantu individu untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

2.4.3.4 Analisis Penyebab Masalah (*Causal Analysis*)

Analisis kausal atau analisis penyebab masalah yaitu merupakan kemampuan individu dalam menganalisis segala penyebab yang dapat menimbulkan permasalahan atau tekanan-tekanan dalam hidupnya. Setiap individu seharusnya dapat memprediksi sebab akibat dari setiap permasalahan juga tantangan yang dihadapinya sehingga ia tidak akan terjatuh dalam kesalahan yang sama dan berulang-ulang.

2.4.3.5 Empati (*Empathy*)

Empati merupakan kemampuan seorang individu dalam menganalisa tanda dan kondisi emosional juga psikologis orang lain. Empati menjadi indikasi individu dalam kapasitas membaca situasi dan kondisi psikologis seseorang. Dengan sikap empati seseorang dapat mengerti dan memperhatikan bahkan juga dapat membantu permasalahan psikologis yang sedang dihadapi oleh orang lain.

2.4.3.6 Efikasi Diri (*Self-Efficacy*)

Efikasi diri merupakan buah dari pengentasan masalah atau tekanan yang berhasil dilewati dengan baik. Efikasi diri dapat diartikan juga sebagai kapasitas keyakinan seseorang terhadap dirinya untuk selalu sukses dan berhasil dalam memecahkan suatu persoalan yang datang berganti. Kemampuan seseorang dalam efikasi yang tinggi dapat mengantarkan dirinya pada kemudahan untuk menghadapi problematika.

2.4.3.7 Kemampuan untuk Meraih Apa yang Diinginkan (*Reaching Out*)

Kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan atau *reaching out* merupakan salah satu kemampuan individu dalam mengambil pelajaran positif dari setiap permasalahan atau tekanan hidup yang telah dilaluinya. Subjek pada klasifikasi rendah cenderung tidak menyadari hal yang harus ia lakukan dalam merealisasikan tujuannya. Begitu juga dengan sebaliknya, subjek pada klasifikasi yang tinggi selalu mengerti langkah yang harus ia ambil dalam mewujudkan tujuan serta impiannya yang ia inginkan. Tidak sedikit individu yang tidak mampu melakukan *reaching out*, karena sejak kecil telah di

biasakan untuk menghindari kegagalan dibanding untuk melatih dalam menghadapinya sehingga individu tersebut lebih banyak menunjukkan rasa takut dibandingkan dengan keinginan untuk menghadapi segala sesuatu di depannya. Tidak sedikit individu yang lebih memilih capaian yang standar dengan resiko yang minim dibandingkan dengan capaian yang tinggi namun harus melalui resiko yang berat juga.

2.4.4 Indikator Resiliensi

Seseorang dapat dilihat bahwa ia resilien atau tidak resilien tentunya harus melewati tahap penentuan dengan menggunakan pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran tersebut dapat dilihat dari suatu indikator yang menjadi penentu seseorang tersebut apakah resilien atau tidak resilien. Indikator yang disebutkan oleh Reivich dan Shatte (2002) dalam buku *Resiliensi Psikologis (Sebuah Pengantar)* oleh Wiwin Hendriani (2022) bahwa “adanya tujuh faktor yang menjadi komponen atau domain utama dalam resiliensi.” Ketujuh faktor tersebut berkaitan dengan aspek resiliensi yang telah mereka sebutkan yaitu regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, analisis kausal, empati, efikasi diri dan *reaching out*.

2.4.4.1 Regulasi Emosi (*Emotion Regulation*)

Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang pada saat dihadapkan oleh sebuah tekanan atau situasi yang menekan. Menurut Reivich dan Shatte (2002) dalam (Hendriani, 2022) bahwa “individu yang kurang mampu mengatur emosi akan mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Sebaliknya,” dalam pernyataan tersebut dapat dikatakan

bahwa ketika seseorang tidak mampu untuk mengatur emosi yang ada dalam dirinya maka individu tersebut akan sulit ketika berinteraksi dan menjaga hubungan dengan orang lain maupun dengan berbagai kondisi lingkungannya.

Reivich dan Shatte (2002) juga mengungkapkan bahwa terdapat dua keterampilan yang harus dimiliki individu untuk memudahkan dalam meregulasi emosi yaitu *calming* dan *focusing*. Individu harus memiliki dua keterampilan tersebut untuk meningkatkan kontrol terhadap respon tubuh dan pikiran ketika berhadapan dengan masalah atau tekanan juga seseorang tersebut harus tetap fokus pada permasalahan yang ada sehingga memudahkan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya.

2.4.4.2 Pengendalian Diri (*Impuls Control*)

Pengendalian diri atau pengendalian impuls merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan keinginan, dorongan diri, hal yang disukai dan juga tekanan yang timbul dalam diri individu. Menurut Reivich dan Shatte (2002) dalam (Hendriani, 2022) bahwa “Individu yang mempunyai kemampuan pengendalian impuls yang rendah akan cepat mengalami perubahan emosi ketika berhadapan dengan berbagai stimulasi dari lingkungan.” Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa ketika seseorang atau individu memiliki kemampuan yang rendah dalam pengendalian diri atau pengendalian impuls maka individu tersebut akan mudah untuk mengalami perubahan emosi saat mengalami tekanan atau masalah. Ketika individu tersebut mulai terlihat perubahan emosinya, maka respon di sekitarnya terhadap perilaku yang ditampakkan akan membuat sekitarnya menjadi tidak

nyaman sehingga berdampak buruk pada hubungan sosial antara individu tersebut dengan sekitarnya.

Sebaliknya bahwa ketika individu itu memiliki pengendalian impuls yang baik, maka ia akan mudah untuk mengendalikan perubahan emosi dalam dirinya. Seseorang dapat mengendalikan diri atau dapat mengendalikan impulsnya dengan cara mencegah terjadinya kesalahan dalam pemikiran, sehingga ia dapat memberikan respon yang baik dan tepat sesuai dengan permasalahan yang ia hadapi. Pengendalian diri atau pengendalian impuls ini berkaitan dengan kemampuan meregulasi emosi yang dimiliki individu tersebut.

2.4.4.3 Optimisme (*Optimism*)

Optimisme merupakan kunci individu untuk mencapai resilien, seperti pendapat Reivich dan Shatte (2002) mengutip dalam buku Resiliensi Psikologis sebuah pengantar (Hendriani, 2022) bahwa “Individu yang resilien merupakan individu yang optimis.” Seorang individu yang memiliki rasa optimisme menunjukkan bahwa ia percaya dan mampu untuk mengatasi masalah yang ia akan hadapi. Hal ini berkaitan dengan efikasi diri yang dimiliki oleh individu tersebut, yaitu rasa percaya bahwa ia mampu untuk melewati dan menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengatur hidupnya.

Optimisme yang harus dimiliki oleh individu agar mencapai resilien yaitu optimisme realistis, dimana optimisme realistis tersebut adalah kepercayaan bahwa akan terwujudnya masa depan yang lebih baik ketika dilakukan dengan

segala usaha untuk mencapai dan mewujudkannya. Ketika individu memiliki rasa optimisme realistis dan juga efikasi diri menjadikannya kunci untuk mencapai resilien dan kesuksesan bagi dirinya di masa depan.

2.4.4.4 Analisis Kausal (*Causal Analysis*)

Analisis kausal mengarah kepada kemampuan individu terkait upayanya untuk mengidentifikasi secara akurat penyebab masalah yang ia hadapi. Ketika individu tidak mampu untuk mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab dari masalah yang ia hadapi secara tepat maka akan terus membuat kesalahan secara berulang. Menurut Reivich dan Shatte (2002) bahwa “gaya berpikir eksplanatorik memegang peranan penting dalam konsep resiliensi.” Dari pendapat tersebut menandakan bahwa individu yang resilien yaitu merupakan individu yang mempunyai daya kognitif yang fleksibel, yaitu individu yang mampu untuk mengidentifikasi setiap penyebab permasalahan yang ada.

Individu yang dikatakan resilien akan terlihat ketika ia menghadapi masalah tidak akan menyalahkan orang lain atau lingkungannya atas semua permasalahan yang menyimpannya, mereka akan fokus dan mencari solusi untuk penyelesaian masalahnya, sehingga ia akan memiliki keinginan dan ketekunan untuk pulih dan bangkit dari masalahnya sehingga ia akan meraih kesuksesan dalam hidupnya.

2.4.4.5 Empati (*Empathy*)

Masing-masing individu memiliki kemampuan tersendiri dalam menginterpretasikan bahasa-bahasa non verbal yang ditunjukkan orang lain.

Reivich dan Shatte (2002) berpendapat bahwa “empati sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain.” Sehingga ketika seorang individu memiliki kemampuan untuk berempati yang baik maka ia cenderung memiliki hubungan sosial yang positif dengan lingkungannya.

Individu akan dikatakan tidak resilien ketika ia tidak memiliki kemampuan untuk merasakan tanda-tanda non verbal di sekitarnya atau tidak memiliki rasa empati terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika individu memiliki rasa empati yang rendah maka akan cenderung menyamaratakan semua keinginan dan emosi orang lain tanpa memahaminya. Karena ketidakmampuan individu tersebut dalam membaca atau merasakan tanda-tanda non verbal di sekitarnya maka akan menempatkan individu tersebut dalam keadaan lingkungan yang kurang baik dan dapat dikatakan merugikan, hal tersebut terjadi karena kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah untuk dipahami, memahami dan dihargai.

2.4.4.6 Efikasi Diri (*Self Efficacy*)

Efikasi diri sama halnya dengan kemampuan analisis kausal individu, karena efikasi diri seperti menggambarkan sebuah keyakinan bahwa individu tersebut mampu untuk memecahkan permasalahan yang sedang ia alami dan mampu untuk keluar dari masalah tersebut sehingga meraih kesuksesan. Sama halnya dengan kemampuan analisis kausal, efikasi diri menjadi salah satu faktor kognitif yang menentukan sikap serta perilaku seseorang dalam menghadapi sebuah permasalahan. Dengan memiliki keyakinan serta

kemampuan untuk menyelesaikan masalah maka individu akan mampu untuk mencari jalan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya dan tidak mudah untuk menyerah atas tekanan dan kesulitan yang menimpanya. Maka individu tersebut dapat dikatakan resilien ketika memiliki kemampuan kognitif baik itu efikasi diri dan juga analisis kausal yang baik.

2.4.4.7 *Reaching Out*

Resiliensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah dan kemudian bangkit dari keterpurukan serta terlepas dari tekanan-tekanan yang ada, tetapi juga termasuk dengan kemampuan individu tersebut untuk meraih hal positif dalam kehidupan setelah ia terlepas dari permasalahan yang menimpanya atau dengan kata lain kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan dalam kehidupannya untuk kedepannya. Tidak sedikit individu yang tidak mampu melakukan *reaching out*, karena sejak kecil telah di biasakan untuk menghindari kegagalan dibanding untuk melatih dalam menghadapinya sehingga individu tersebut lebih banyak menunjukkan rasa takut dibandingkan dengan keinginan untuk menghadapi segala sesuatu di depannya.

Tidak sedikit individu yang lebih memilih capaian yang standar dengan resiko yang minim dibandingkan dengan capaian yang tinggi namun harus melalui resiko yang berat juga. Hal ini karena individu-individu tersebut tidak memiliki faktor *reaching out* yang baik sehingga individu-individu tersebut dapat dikatakan tidak resilien.

2.5 Tinjauan Tentang Remaja

2.5.1 Definisi Remaja

Remaja merupakan masa dimana seorang anak beralih menuju dewasa. Remaja sulit di definisikan secara tepat karena banyak sudut pandang yang mendefinisikan remaja. Dalam bahasa latin kata remaja disebut “*adolescens*”. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan sesuatu dari remaja yang berkaitan dengan tercapainya kematangan fisik dan masa yang berbeda-beda. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh berbagai ahli, seperti mengutip dalam (Saputro, 2018) menurut Papalia dan Olds bahwa “masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluh tahun.

Menurut Widyastuti Yani (2009) mengutip dalam buku (Setyaningrum, 2021) bahwa “masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja yakni antara usia 10-19 tahun, adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas. Sedangkan menurut Anna Freud berpendapat bahwa “pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan.”

Penjelasan dari WHO (*World Health Organization*) tentang usia fase remaja dengan mengutip dalam (Diananda, 2019) bahwa “remaja adalah penduduk dalam

rentang usia 10-19 tahun” sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pada pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa “remaja adalah kelompok penduduk dengan rentang usia 10 sampai 18 tahun” dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.

Beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa remaja dalam bahasa latin disebut *adolescens* adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi, masa remaja merupakan masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas. Rentang usia masa remaja dimulai dari usia 10 tahun hingga umur 24 tahun dan belum menikah.

Remaja menjadi harapan bagi setiap bangsa terutama Indonesia, kualitas dari remaja sangat diharapkan bagi kemajuan suatu bangsa karena remaja yang beranjak dewasa tersebut nantinya akan menjadi penerus dari suatu bangsa. Apabila kualitas penerus bangsa dapat dikatakan buruk maka bangsa tersebut akan mengalami kemunduran, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas remaja sejak dini agar nantinya ketika mereka telah dewasa dapat membawa diri mereka, keluarga, masyarakat dan tentunya bangsa mereka menjadi lebih baik lagi.

2.5.2 Ciri-Ciri Remaja

Pada masa remaja, terjadi berbagai perubahan-perubahan seperti perubahan fisik, emosi dan psikisnya. Pada masa remaja selanjutnya kita harus dapat membedakan antara masa sebelumnya dengan masa yang akan dihadapinya kelak.

Pada masa remaja tersebut terdapat ciri-ciri, seperti mengutip dalam (Enggar, 2018) bahwa ciri-ciri remaja yaitu:

1. Pertumbuhan fisik lebih cepat daripada masa anak-anak;
2. Terjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder;
3. Mulai tertarik dengan lawan jenis; dan
4. Emosi yang meluap-luap.

Dalam segi psikis juga, masa remaja menunjukkan ciri-ciri perubahan yang terjadi. Ciri-ciri perubahan remaja secara psikis yaitu:

1. Pencarian identitas diri, remaja sering melakukan hal-hal yang bersifat coba-coba karena besarnya rasa keingin tahunya.
2. Adanya ketertarikan pada lawan jenis, pada masa ini seorang remaja akan mulai merasakan ketertarikan dengan lawan jenisnya, baik perasaan cinta ataupun rasa kagum.

Kemudian ciri-ciri masa remaja lainnya dikemukakan oleh Hurlock (1980) mengutip penjelasannya dalam (Utaminingsih & Abriani Maharani, 2017) bahwa ciri-ciri masa remaja yaitu:

1. Masa remaja sebagai periode yang penting, karena semua perkembangan di usia remaja tersebut memerlukan penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, minat dan nilai baru.
2. Masa remaja sebagai periode peralihan, pada usia tersebut seorang remaja bukan lagi anak-anak juga belum dapat dikatakan dewasa.

3. Masa remaja sebagai periode perubahan, karena terdapat lima perubahan pada diri remaja yang bersifat universal, yaitu meningginya emosi, perubahan tubuh, minat dan peran, perubahan nilai-nilai serta bersifat ambivalen.
4. Masa remaja sebagai usaha bermasalah, sebab pada masa remaja sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan baru dan remaja biasanya merasa ingin menyelesaikan masalahnya sendiri.
5. Masa remaja sebagai masa mencari identitas, dimana status remaja yang ambivalen menjadikan suatu dilema bagi remaja.
6. Masa remaja sebagai usaha yang menimbulkan ketakutan, karena banyaknya pandangan negatif terhadap remaja sehingga menjadikan remaja mengalami kesulitan dalam usaha menuju usia dewasa.
7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis, menjelang berakhirnya usia remaja pada umumnya mereka terganggu oleh idealisme yang berlebihan.
8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa, saat usia kematangan yang semakin mendekat membuat remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa.

2.6 Tinjauan Tentang Anak terlantar

2.6.1 Definisi Anak Terlantar

Seiring berkembangnya zaman dan segala kebutuhan yang serba naik dalam segi harga juga ada beberapa yang sulit di dapat sedangkan pendapatan masing-masing orang tidak semuanya merata. Ada beberapa orang yang sulit mendapat pekerjaan dan pendapatan ada juga yang mudah dalam mendapat pekerjaan serta

pendapatan untuk kehidupannya. Orang-orang yang kurang beruntung tersebut dalam mendapatkan pendapatan untuk kehidupan sehari-harinya dapat dikatakan orang yang kurang mampu atau bisa saja tergolong pada fakir miskin.

Masalah ekonomi ini terkadang menjadi salah satu permasalahan yang dapat menimbulkan masalah-masalah baru, salah satunya masalah anak terlantar. Kasus penelantaran anak saat ini dirasa sering terjadi, meskipun penyebabnya dikarenakan unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan orang tua. Anak terlantar adalah kondisi atau permasalahan dimana anak tersebut tidak dapat terpenuhi segala kebutuhan, hak dan kewajibannya yang seharusnya ia dapat sebagai anak. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa “Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.” Sedangkan mengutip dalam (Catur Rohman Kusmayadi & Musleh, 2022) bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan hak sebagaimana hak anak. Keluarga dan kerabatnya tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan hak-hak anak tidak terpenuhi.” Kemudian menurut Howard Dubowitz (2010) mengutip dalam (Arifin, 2019) bahwa “Anak terlantar adalah suatu bentuk pengabaian terhadap perawatan anak menimbulkan resiko bagi anak.”

Anak yang tidak terpenuhi segala kebutuhannya dikatakan anak terlantar merupakan anak-anak yang termasuk dalam kategori anak rawan atau anak-anak yang memerlukan atau membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of speial protection*), dikatakan anak rawan karena menggambarkan kelompok anak-

anak yang karena suatu situasi, kondisi dan tekanan yang dihadapinya membuat mereka belum tentu dan bahkan tidak tepenuhi hak-haknya bahkan terkadang dilanggar hak-haknya sehingga terkadang perkembangan kehidupan anak tersebut akan terganggu di masa yang akan datang nanti bahkan dapat menyebabkan masalah-masalah baru dan berkepanjangan apabila tidak teratasi sejak dini.

Anak yang mengalami kasus penelantaran bukan berarti anak tersebut telah kehilangan kedua orang tua atau salah satu orang tuanya, namun bisa juga karena ia benar-benar tidak mendapatkan hak dan pemenuhan sejak ia dilahirkan. Bahkan anak yang tidak diharapkan kelahirannya akibat dari hubungan seks diluar pernikahan atau hubungan seks yang tidak tercegah akibat tidak melakukan KB juga ketika ia lahir dan tidak diharapkan oleh orang tuanya sehingga diacuhkan bahkan ada yang dibuang juga termasuk anak terlantar.

2.6.2 Ciri-Ciri Anak Terlantar

Umumnya anak-anak yang tumbuh dan hidup dalam pengawasan yang penuh dari orang tuanya akan terlihat dengan mudah ketika dibandingkan dengan anak-anak yang mengalami masalah penelantaran. Namun ada beberapa ciri-ciri yang dapat membedakan bahwa anak tersebut merupakan anak yang menjadi korban anak terlantar. Ciri atau kriteria anak terlantar seperti yang disebutkan dalam (DINSOS, 2023) bahwa anak terlantar memiliki ciri-ciri :

1. Anak berusia 5-18 tahun yang mengalami perlakuan yang salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
2. Berasal dari keluarga fakir miskin.

3. Anak yang mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Anak yang tidak pernah sekolah atau mengalami putus sekolah.
5. Makan kurang dari 2 kali sehari.
6. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai.
7. Jika sakit tidak diobati.
8. Yatim, piatu atau yatim piatu
9. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin.
10. Anak yang kurang dari 18 tahun dan bekerja.

Selain itu juga, menurut Suyanto (2016) mengutip dalam (Arifin, 2019) menyebutkan ciri-ciri yang menandai anak dikategorikan terlantar yaitu:

1. Berusia 5-18 tahun dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.
2. Anak yang terlahir dari hubungan seks diluar nikah dan kemudian kedua orang tuanya tidak ada yang mengurus dan merawat anak tersebut karena beberapa alasan.
3. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan.
4. Tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga.
5. Anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis, orang tua bercerai, anak yang hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah.

2.6.3 Faktor Penyebab Anak Terlantar

Selain dikarenakan ketidak mampuan orang tua dalam memenuhi hak dan segala kebutuhan anak baik jasmani, rohani dan sosialnya, anak terlantar juga dapat dikarenakan oleh berbagai sebab lainnya. Beberapa faktor-faktor penyebab anak terlantar yaitu :

1. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik/berada di garis kemiskinan;
2. Orang tua yang tidak harmonis/bercerai;
3. Orang tua yang berhadapan dengan hukum;
4. Salah satu atau kedua orang tua nya meninggal;
5. Anak yang terlahir dari hubungan seks diluar nikah dan ketidak siapan kedua orang tuanya untuk mengurus anak tersebut;
6. Anak yang tidak direncanakan akibat tidak menggunakan alat kontrasepsi atau KB;
7. Anak yang ditinggal orang tua nya sejak kecil dan dirawat oleh keluarga yang lainnya, dan lain sebagainya.

Apabila permasalahan anak terlantar tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan tidak ada upaya pemecahan masalahnya sejak dini, bukan hanya perkembangan anak yang akan terganggu namun juga dapat mengganggu masa depan anak tersebut sehingga bisa saja menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak akan ada hentinya dan sulit dituntaskan.

2.7 Tinjauan Tentang Pemberdayaan

2.7.1 Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses meningkatkan kekuatan pribadi, antarpribadi, atau politik sehingga individu-individu, keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas dapat mengambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki situasi-situasi mereka. Menurut Robbins, Chatterjee, dan Canda (1998) dalam (Fahrudin, 2018a) bahwa pemberdayaan menunjukkan proses yang dengan itu individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh kekuatan, akses pada

sumber-sumber, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Dalam melakukan itu, mereka memperoleh kemampuan untuk mencapai aspirasi-aspirasi dan tujuan-tujuan pribadi dan kolektif mereka yang tertinggi.

Menurut Rappaport (1984) dalam (Jawahir & Uyuni, 2019) menyebutkan bahwa “Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.”

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial pada pasal 1 ayat 6 menjelaskan definisi pemberdayaan sosial, yaitu bahwa “Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.” Pemberdayaan merupakan konsep yang paling sering digunakan dalam kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat yang menekankan kepada kemandirian dari masyarakat. Menurut Theresia (2014) dalam (Laksono & Rohmah, 2019) bahwa pemberdayaan yang dimaksudkan adalah memberikan kesempatan kepada lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kemulyaan dan harga diri masyarakat secara mandiri. Pemberdayaan adalah memberikan kekuatan pada masyarakat yang kurang mampu sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

Teori-teori pemberdayaan secara tegas memusatkan pada hambatan-hambatan struktural yang menghalangi orang untuk menjangkau sumber-sumber yang perlu untuk kesehatan dan kesejahteraan. Teori-teori pemberdayaan tidak hanya berkepentingan dengan proses pemberdayaan, tetapi juga dengan hasil-hasil yang memberikan akses yang lebih besar pada sumber-sumber dan kekuatan bagi individu-individu dan kelompok-kelompok marginal. Dalam pekerjaan sosial, pemberdayaan dirumuskan sebagai proses yang melibatkan pekerja sosial dalam sejumlah kegiatan dengan klien yang timbul karena penilaian negatif yang didasarkan atas keanggotaan dalam suatu kelompok yang dicap jelek.

2.7.2 Pemberdayaan dalam Pekerjaan Sosial

Pernyataan tentang pekerja sosial bertujuan “*to help people to help themselves,*” yaitu membantu orang untuk dapat membantu dirinya sendiri. Ini berarti bahwa pekerjaan sosial tidak menolong orang untuk menerima bantuan dan terus bersandar pada bantuan orang lain, tetapi membangkitkan kemampuannya untuk dapat berdiri sendiri. Beberapa unsur yang dikemukakan oleh DuBois dan Miley (2005) dalam (Fahrudin, 2018a) bahwa terdapat unsur umum yang menandai proses pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Memusatkan pada kekuatan-kekuatan.
- b. Bekerja secara kolaboratif.
- c. Secara kritis memikirkan tentang pengaturan struktural.
- d. Menghubungkan kekuatan pribadi dan kekuatan politis.

Pemberdayaan tidak harus berakibat perjuangan kekuatan atau mengambil kekuatan dari suatu kelompok oleh kelompok lain. Pemberdayaan tidak berarti meningkatkan kekuatan seseorang atau suatu kelompok dengan mengurangi kekuatan orang atau kelompok lain.

2.8 Tinjauan Tentang Lembaga Sosial

2.8.1 Definisi Lembaga Sosial

Dasarnya, lembaga sosial tidak dapat dipisahkan dengan lembaga pemerintah/negara, lembaga kemasyarakatan, lembaga keluarga dan individu itu sendiri. Lembaga sosial merupakan akumulasi dari berbagai unsur individu dan individu tersebut bersumber dari berbagai keluarga. Lembaga bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Secara bahasa, definisi lembaga sosial dapat diartikan dari istilah/kata, yaitu *institution* yang memiliki arti dari suatu lembaga sebab merupakan sekumpulan norma-norma pengatur perilaku dalam aktivitas hidup tertentu. Menurut Koentjaraningrat dalam (Sugiyanto, 2002) lembaga sosial sebagai pranata sosial yang diartikan sebagai suatu sistem tata kelakuan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup.

2.8.2 Fungsi dan Manfaat Lembaga Sosial

a. Fungsi Lembaga Sosial

- 1) Memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku dalam memenuhi kebutuhan pokok/bersama.
- 2) Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.

- 3) Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.

b. Manfaat

- 1) Lembaga sosial bermanfaat sebagai pengawas atas konsekuensi hidup orang banyak.
- 2) Setiap institusi atau lembaga merupakan badan pembina terhadap sosial budaya yang terjamin stabilitas sosial dan kelangsungannya.
- 3) Setiap lembaga sosial menyediakan peranan-peranan sosial dengan sikap yang sesuai dengan institusi tersebut sehingga setiap orang dapat memilih lembaga mana yang sesuai dengan keinginan individu.
- 4) Setiap lembaga sosial sudah menentukan cara bertingkah laku yang diterima oleh masyarakat.

2.8.3 Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial

Gillin dalam (Sugiyanto, 2002) memberikan ciri-ciri umum atau karakteristik mengenai lembaga sosial, diantaranya yaitu:

1. Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan atau tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib dan lainnya.
2. Lembaga sosial merupakan organisasi yang pola-pola pemikiran dan perilakunya yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan.
3. Lembaga sosial merupakan suatu tingkat kekekalan tertentu, umurnya lama dan melalui proses yang panjang.
4. Setiap lembaga sosial mempunyai satu atau beberapa tujuan.
5. Setiap lembaga sosial mempunyai alat atau perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
6. Setiap lembaga sosial mempunyai lambang, simbol, yang khas dan menggambarkan tujuan dan fungsinya.